

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan suatu negara pada dasarnya menjadi semakin kompleks dari masa ke masa, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh alasan tersebut hal yang menjadi suatu kebiasaan sebuah negara adalah terbentuknya suatu kerja sama antar negara, hal ini mencakup kerja sama antar negara tetangga, kawasan, hingga negara diluar kawasan. Salah satunya seperti kerja sama yang dibentuk oleh negara Indonesia dan Australia di banyak bidang. Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Australia pada dasarnya merupakan negara yang membutuhkan Indonesia dan memiliki kepentingan yang kebergantungan. Hal ini dapat dilihat dari sektor geografis yang menunjukkan kedekatan dua negara tersebut. Di sisi lain, Peran penting Indonesia di kancah kawasan ASEAN dapat menguntungkan Australia sebagai penghubung dalam sektor perdagangan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Faktanya, Indonesia hanya menjadi mitra dagang Australia pada urutan 13, namun disisi lain kekuatan Indonesia di sektor kawasan ASEAN yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan luas wilayah terbesar menjadi suatu target pasar yang strategis bagi negara Australia (Cipto, 2010).

Indonesia menjadi tujuan penting bagi Australia, hal ini digambarkan pada *white book* pertahanan dan kebijakan luar negeri Australia tahun 1997. Pada buku ini menjelaskan mengenai hubungan Australia-Indonesia yang penting, dimana posisi strategis Indonesia menjadi jembatan jalur perdagangan antara Australia dengan negara dikawasan ASEAN. Indonesia yang memiliki populasi dan posisi strategis di Asia Tenggara menjadi alasan penting bagi Australia dalam membangun hubungan bilateral dengan Indonesia (Cipto, 2010).

Indonesia dan Australia semakin kompak dengan mengambil kesepakatan untuk membuka lebih luas hubungan kerja sama bilateral antar kedua negara, hal ini mencakup bidang politik, keamanan, ekonomi, dan pembangunan. Pada tahun 2010, dalam tujuan untuk merealisasikan hubungan bilateral pada sektor ekonomi, Indonesia-Australia sepakat menjalin hubungan bilateral *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2013).

Dengan terbentuknya IA-CEPA antara Indonesia dengan Australia menjadi sebuah pondasi kuat dalam langkah awal meningkatkan dan memperluas hubungan bilateral antar kedua negara. Dengan adanya hubungan bilateral IA-CEPA dimaksudkan untuk meningkatkan peluang kerja sama bilateral antar kedua negara pada sektor perdagangan dan investasi, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk meningkatkan kerja sama pada sektor ekonomi ataupun dalam membuka peluang pasar bagi kedua negara. Adanya hubungan bilateral IA-CEPA juga menjadi harapan dalam peningkatan sektor dagang dan investasi, hal ini karena merujuk pada faktor geografis yang berdekatan dan faktor saling membutuhkan (Department of Foreign Affairs and Trade, 2010).

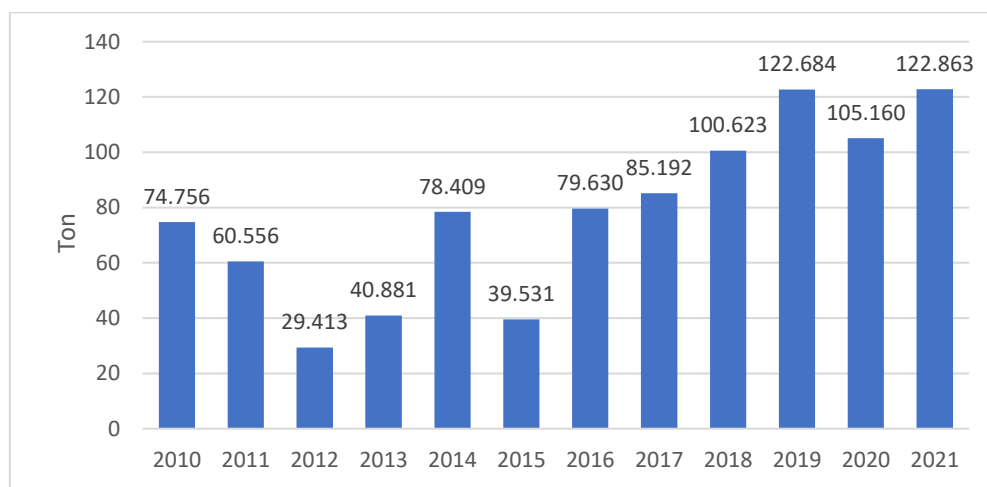
Penerapan hubungan bilateral Indonesia-Australia yang terjalin menghadirkan banyak prospek kerja sama seperti dalam sektor ekonomi, Indonesia dan Australia menjalin hubungan kerja sama dalam bidang impor daging sapi, hal ini merupakan suatu kepentingan nasional melihat permintaan pasar Indonesia dalam sektor daging sapi sangat tinggi dan berbanding dengan ketersediaan daging sapi dalam negeri yang tidak mencukupi. Hal ini menyebabkan perlunya penambahan pasokan daging sapi dari luar dan solusi terbaik yang dapat diambil oleh negara adalah dengan cara melakukan impor dan salah satu negara produsen daging sapi terbesar di dunia adalah Australia (Purnamawati, 2013).

Terjalinya kerja sama antara Indonesia-Australia tidak selalu berjalan mulus, pada beberapa situasi terdapat konflik yang tidak dapat dihindari. Seperti pada tahun 2006 Australia memberikan bantuan politik sementara kepada warga Papua yang melakukan pelayaran ke Australia, hal ini dipicu oleh Operasi Papua Merdeka (OPM) yang mengancam dan menipu warga sehingga mengakibatkan warga memilih meninggalkan Papua dan pindah menjadi imigran di Australia dan pada tahun 2012 terjadi ketegangan kembali, hal ini didasari oleh sebuah toko di Perth yang memajang bendera OPM sehingga menimbulkan kecurigaan Indonesia terhadap Australia yang turut serta mendukung OPM. Pada tahun 2009 juga terjadi isu penyadapan terhadap pejabat tinggi Indonesia, hal ini dilakukan untuk mencuri informasi mengenai strategi diplomasi Indonesia. Akibatnya pada tahun 2013 terjadi penangguhan pada kegiatan IA-CEPA dan Indonesia memulangkan Nadjib Riphath yang merupakan duta besar di Canberra. Dalam situasi ini Australia merasakan dampak yang cukup signifikan pada sektor ekonomi akibat ketegangan yang terjadi, dimana nilai ekspor pada sektor manufaktur mengalami penurunan. Namun pada nilai ekspor daging sapi mengalami trend kenaikan. Hal ini dilatar belakangi oleh daging sapi yang merupakan produk penting, melihat Indonesia yang memiliki berbagai acara adat

dan agama yang menggunakan daging sapi menyebabkan permintaan akan selalu tinggi (BBC News, 2017).

Australia merupakan salah satu pemasok daging terbanyak bagi Indonesia, hal ini merujuk dari peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia yang memiliki peningkatan PDB yang terus meningkat dan stabil dari tahun ke tahun, pertambahan penduduk juga menjadi faktor lain yang menjadikan permintaan daging dalam negeri semakin tinggi. Indonesia yang saat ini semakin maju juga menjadikan masyarakatnya peduli akan kesehatan dan mengerti pentingnya protein hewani bagi kebutuhan tubuh (Noor, 2008).

Grafik 1. Volume Impor Daging Sapi dari Australia ke Indonesia tahun 2010-2021



Sumber: Databooks

Gambar 1 merupakan tren impor daging sapi dari Australia menuju Indonesia. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada tahun 2010-2015 grafik cenderung mengalami pergerakan yang dinamis, hal ini didasari oleh berbagai sebab, pada intinya penurunan yang terjadi didasari oleh ketegangan antara kedua negara, dan prospek kenaikan impor didasari oleh permintaan daging sapi Indonesia yang tidak dapat terpenuhi oleh daging sapi lokal sehingga harus melakukan impor sapi dari Australia, karena menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem *country based* hal ini menjadikan Indonesia harus melakukan impor daging sapi dari negara-negara yang telah dinyatakan bebas dari Penyakit Mulut Kuku (PMK). Dan baru pada tahun 2016 Indonesia mengubah sistem menjadi *zone based* dalam hal ini bertujuan untuk memperluas sektor perdagangan Indonesia di pasar global (Pahlevi, 2022).

Pada gambar 1, terlihat pada tahun 2016 nilai impor daging sapi Indonesia dari Australia memiliki rata-rata 80.000 ton hal ini didasari oleh konsumsi daging sapi per kapita sebesar 0,417 kg. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 12,5 persen yaitu diangka 0,469 kg per kapita. Peningkatan ini didasari oleh jumlah penduduk yang meningkat dan pola selera konsumsi masyarakat yang berubah sehingga mengakibatkan konsumsi daging nasional ikut naik. Pada tahun 2018 kementerian Pertanian (Kemtan) menjabarkan bahwa produksi daging di Indonesia belum dapat menutup permintaan yang ada, tercatat permintaan daging Indonesia pada tahun 2018 mencapai 662,54 ton dengan rata-rata 2,5 kg perkapita pada tahun 2018. Pada bulan Mei-Juni 2018 kebutuhan daging lokal yang dapat terpenuhi oleh produsen lokal tercatat 75,403 ton dari total keseluruhan 116,339 ton, dan 40,936 ton sisanya dipenuhi dengan cara impor. Kementerian Pertanian mencatat kebutuhan daging sapi pada bulan Maret 2019 sebesar 56.000 ton, sedangkan produksi daging sapi yang ada 35.000 ton (Pahlevi, 2022).

Kompetisi antara negara-negara pengimpor daging sapi di Indonesia adalah tentang persaingan untuk memasok kebutuhan daging sapi di pasar domestik. Beberapa negara yang menjadi pengimpor daging sapi utama di Indonesia antara lain Australia, Amerika Serikat, Brasil, dan India. Kompetisi di antara negara-negara pengimpor daging sapi ini bergantung pada berbagai faktor, seperti harga, kualitas, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan impor daging sapi yang memenuhi persyaratan dan memastikan ketersediaan daging sapi yang cukup di pasar domestik (Anwar, 2019).

Faktanya Indonesia-Australia memiliki kondisi impor sapi yang naik secara konsisten dalam rentan waktu 2016-2019. Hal ini merujuk kebutuhan daging sapi yang ada tidak memadai dan bila Indonesia hanya mengandalkan dari para peternak sapi lokal akan mengakibatkan langkanya ketersediaan daging sapi di Indonesia, dan dari kasus tersebut Indonesia harus mengambil solusi dengan melakukan impor salah satunya dari Australia (Mas' oed, 2008).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai “Kerja sama Indonesia-Australia Dalam Bidang Impor Daging Sapi Tahun 2016-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia memilih Australia sebagai pemasok daging sapi terbesar pada tahun 2016-2019?

1.3 Kerangka Teoritik

1.3.1 Konsep Food Security

Konsep *food security* mulai berkembang pada tahun 1970-an bersamaan dengan terjadinya krisis pangan dan kelaparan dunia dengan dampak terbesar pada kawasan Asia dan Afrika. Pada awalnya konsep *food security* membawa pendekatan “*sufficient food production*”, namun pada tahun 1980-an konsep ini dipertajam oleh IFPRI menjadi “*sufficient food production at affordable prices and does not damage the environment*”. Pendekatan ini bertujuan untuk menekankan pada aspek produksi dengan menyertakan akses rumah tangga dalam mendapatkan pangan dengan harga yang dapat dijangkau (Jacobs, 2009).

World Food Summit menyatakan bahwa *food security* akan berjalan apabila semua orang sadar terhadap pangan yang cukup, bergizi dan aman. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), *food security* adalah situasi dimana rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan bagi anggota keluarganya dan tidak memiliki resiko kehilangan kedua akses tersebut. Dari dua penjelasan tersebut, fokus dalam konsep *food security* bertujuan untuk dapat memberikan rumah tangga/individu pangan disetiap waktu, disetiap tempat, dengan memenuhi standar harga yang terjangkau, dan dapat memenuhi kebutuhan gizi serta aman untuk dikonsumsi (Wehrheim, 2006).

Food security memiliki 3 subsistem untuk menunjang sistem kerja pada ekonomi pangan, diantaranya subsistem penyediaan pangan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem penyediaan pangan berkaitan dengan aspek produksi, cadangan pangan, bantuan pangan, dan impor. Subsistem distribusi mencakup aspek penyaluran yang merata pada seluruh wilayah dan merata sepanjang waktu. Subsistem konsumsi berfokus pada pengarahannya lapangan, dengan tujuan membangun pola pangan yang memenuhi kaidah mutu, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalan (Wehrheim, 2006).

Dewan Ketahanan Pangan menyatakan bahwa untuk membentuk *food security* harus didasari oleh ketersediaan pangan yang dapat diperoleh melalui produksi domestik, impor, maupun bantuan pangan (Dewan Ketahanan Pangan, 2009). Wijaya (2016) menyatakan

dalam membangun *food security* harus memiliki keterjangkauan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya secara optimal, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi, dan konsumsi pangan yang bergizi (Wijaya, 2016).

Aplikasi konsep *food security* menerapkan beberapa landasan komponen dasar dalam menjalankan kajian *food security*, diantaranya seperti penilaian kualitas dan keamanan pangan, sistem inspeksi peraturan keamanan pangan, sistem pelacakan dan pelaporan, kerja sama yang terjalin dengan negara distributor. Semua landasan ini diatur dan diawasi langsung oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan World Health Organization (WHO) sebagai badan keamanan pangan internasional. Departemen Pertanian Australia (DA) bertanggung jawab atas regulasi dan standar keamanan pangan daging sapi di negara Australia. Australia juga memiliki program nasional "*Meat Safety Enhancement*" yang mengatur produksi daging sapi yang aman dan berkualitas. Pemeriksaan ketat juga dilakukan untuk memastikan daging sapi memenuhi standar kebersihan dan kesehatan hewan (Dewan Ketahanan Pangan, 2009).

Daging sapi Australia terkenal karena kualitasnya yang tinggi dan keamanan pangan yang dijaga dengan baik. Australia memiliki standar yang ketat dalam pemeliharaan hewan dan penggunaan obat-obatan veteriner, sehingga daging sapi yang diekspor dari Australia dianggap aman untuk dikonsumsi. Australia juga memiliki *traceability* yang kuat untuk produk daging sapi. Ini berarti setiap potongan daging sapi dapat dilacak dari peternakan hingga pemasaran, sehingga memberikan jaminan keaslian dan keamanan bagi konsumen di Indonesia. Selain itu, Australia dikenal dengan standar kesejahteraan hewan yang tinggi dalam industri peternakan mereka. Hewan-hewan yang dipelihara di Australia biasanya diberi akses ke padang rumput yang luas, makanan berkualitas tinggi, dan perawatan yang baik. Kualitas hidup yang lebih baik ini berdampak pada kualitas daging yang dihasilkan. Australia juga fokus pada praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Banyak peternakan di Australia menerapkan teknik pertanian yang bertanggung jawab secara lingkungan, seperti penggunaan lahan yang efisien, pengelolaan air yang baik, dan penggunaan energi terbarukan. Hal ini juga dapat menarik minat Indonesia yang semakin peduli dengan aspek keberlanjutan. Dan yang terakhir, Australia memiliki populasi sapi yang besar dan luas, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang besar seperti Indonesia (Helmiah, 2021).

1.3.2 Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif adalah salah satu teori utama dalam ekonomi internasional yang dikembangkan oleh David Ricardo pada abad ke-19 di Inggris. Teori ini menjelaskan bahwa negara-negara dapat memperoleh manfaat ekonomi dengan melakukan perdagangan berdasarkan perbedaan relatif biaya produksi barang atau jasa. Pada dasarnya, teori keunggulan komparatif berpendapat bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu barang atau jasa tertentu. Keunggulan komparatif ini mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam sumber daya alam, keahlian tenaga kerja, teknologi, dan faktor produksi (Ricardo, 2004).

Teori Keunggulan Komparatif juga berpendapat bahwa negara-negara seharusnya memanfaatkan keunggulan komparatif mereka dengan melakukan spesialisasi dalam produksi barang atau jasa. Dengan melakukan spesialisasi, negara akan dapat menciptakan efisiensi dalam produksi dan meningkatkan produktivitas. Teori keunggulan komparatif tidak mengasumsikan bahwa suatu negara harus menjadi yang terbaik dalam komoditas jenis produksi. Sebaliknya, teori ini menjelaskan bahwa negara harus berfokus pada produksi barang atau jasa yang memiliki keunggulan relatif dalam hal biaya produksi sehingga negara dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki (Ricardo, 2004).

Teori keunggulan komparatif memiliki implikasi penting dalam konteks perdagangan internasional. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, negara-negara dapat memperluas pasar mereka dan memaksimalkan efisiensi produksi. Ini memungkinkan negara-negara untuk memfokuskan sumber daya mereka pada kegiatan produksi yang memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan mencoba memproduksi semua barang sendiri. Teori keunggulan komparatif mendukung liberalisasi perdagangan internasional dan pemisahan pekerjaan internasional. Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, negara-negara dapat memaksimalkan efisiensi produksi, memperluas pasar, meningkatkan pilihan konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Blaug, 1992).

Paul Samuelson menyatakan bahwa “Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, bahkan jika suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam semua sektor”. Selain itu, John Stuart Mill juga menyatakan “Pentingnya perdagangan

internasional dan keunggulan komparatif dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara”. Secara keseluruhan, teori keunggulan komparatif menjelaskan pentingnya spesialisasi dan perdagangan internasional berdasarkan keunggulan relatif dalam produksi. Konsep ini merupakan dasar dalam pemahaman perdagangan internasional dan memiliki implikasi penting dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan antar negara (Blaug, 1992).

Aplikasi yang diterapkan dalam teori keunggulan komparatif meliputi spesialisasi dimana Australia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi daging sapi dibandingkan dengan Indonesia yang dilandasi oleh faktor-faktor seperti kondisi iklim, skala produksi, dan keahlian dalam peternakan membuat Australia mampu menghasilkan daging sapi dengan biaya produksi yang lebih rendah dan kualitas yang baik. Selanjutnya, aplikasi biaya produksi dimana dengan mengimpor daging sapi dari Australia, Indonesia dapat menghemat biaya produksi yang lebih tinggi. Biaya produksi yang lebih rendah di Australia mencerminkan efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya alam, infrastruktur peternakan yang maju, dan ekonomi skala yang lebih besar. Dengan mengimpor daging sapi, Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya dan tenaga kerja mereka ke sektor ekonomi lain di mana mereka memiliki keunggulan komparatif (Kementan, 2018).

Australia memiliki kualitas dan pasokan yang stabil, dimana Australia dikenal dengan kualitas daging sapi yang tinggi dan standar keamanan pangan yang ketat. Dengan mengimpor daging sapi dari Australia, Indonesia dapat memenuhi permintaan domestik akan daging sapi yang berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Selain itu, dengan memiliki pasokan yang stabil dari Australia, Indonesia dapat mengurangi fluktuasi harga dan kekurangan pasokan yang mungkin terjadi jika mereka hanya mengandalkan produksi lokal. Aplikasi yang terakhir adalah hubungan dagang, melalui impor daging sapi dari Australia, Indonesia memperkuat hubungan dagang bilateral dengan negara tersebut. Keunggulan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan ini dapat menciptakan saling ketergantungan positif antara kedua negara, yang dapat berdampak positif pada kerjasama ekonomi dan politik lainnya di masa depan (Ismail, 2013).

Negara Australia memiliki kompetitor dalam sektor perdagangan daging sapi, diantaranya yaitu negara Brasil yang salah satu produsen daging sapi terbesar di dunia. Negara ini memiliki keunggulan komparatif dalam hal sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan yang luas dan alam yang cocok untuk peternakan sapi. Selain itu, Brasil juga memiliki biaya produksi yang relatif rendah, termasuk biaya pakan dan tenaga kerja.

Namun pada tahun 2017, negara Brasil mendapatkan isu kesehatan terkait skandal “*Operation Carne Fraca*” yang melibatkan penyelundupan daging yang tidak layak konsumsi dan praktik korupsi di lembaga pengawas. Isu tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas dan keamanan daging sapi yang diekspor dari Brasil. Selanjutnya adalah negara Amerika Serikat yang memiliki keunggulan komparatif pada efisiensi produksi yang tinggi dan teknologi pertanian yang maju. Selain itu, Amerika Serikat memiliki akses terhadap sumber daya pakan yang melimpah, seperti jagung dan kedelai, yang merupakan bahan pakan utama dalam industri peternakan sapi. Namun kekurangan yang ada dari daging sapi asal Amerika adalah biaya yang tinggi dan jarak transportasi yang jauh, selain itu terdapat beberapa praktik penggemukan dengan pemberian hormon pertumbuhan pada sapi untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan produksi daging. Meskipun praktik ini dianggap aman oleh lembaga pengawas pangan seperti FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika Serikat, beberapa negara memiliki kekhawatiran tentang penggunaan hormon dalam daging sapi. Terakhir adalah negara India, negara India memiliki keunggulan dengan berbagai jenis ras sapi yang khas, seperti Brahman, Gir, Ongole yang mengandung protein tinggi dan berbagai nutrisi penting seperti zat besi, seng, dan vitamin B kompleks. Daging sapi India juga memiliki nilai impor yang murah. Namun, Daging sapi India memiliki cita rasa yang berbeda dari negara-negara lain. Selain itu, nilai harga daging sapi dari India yang masuk ke Indonesia dapat lebih murah dari daging sapi lokal yang dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar daging di Indonesia (Chalib, 2021).

1.4 Hipotesa

Indonesia memilih Australia sebagai pemasok daging sapi terbesar pada tahun 2016-2019, karena:

1. Kriteria daging sapi impor dari Australia yang masuk ke Indonesia memenuhi standar dan regulasi keamanan pangan internasional.
2. Daging sapi Australia memiliki keunggulan komparatif dibanding daging sapi dari negara kompetitor.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepentingan Indonesia memilih Australia sebagai pemasok daging sapi terbesar pada tahun 2016-2019.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pengolahan data sekunder meliputi studi pustaka yang mengutip dari berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, jurnal internasional, laporan pemerintah, siaran pers, situs web/ komunitas online yang kredibel, serta melalui sumber lain yang terpercaya. Dimana metode ini dilakukan dengan menganalisis melalui studi pustaka yang sudah ada yang berguna untuk menekankan proses penelitian pada deskripsi tentang suatu fenomena.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam mewujudkan sebuah penulisan maupun penelitian ini yang tersusun menggunakan susunan yang baik dan sistematis, terdapat sebuah sistematis dalam penulisan sebuah penelitian yang berbentuk skripsi yaitu:

BAB 1 terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan membahas mengenai latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan hubungan bilateral Indonesia-Australia pada sektor impor daging sapi. Kemudian, rumusan masalah sebagai fokus batasan penelitian. Penulis menggunakan kerangka teori untuk menganalisis masalah secara ilmiah. Berikutnya adalah hipotesis, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 akan membahas mengenai kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam sektor perdagangan, dimana pada bab ini akan menguraikan penjelasan mengenai landasan hubungan bilateral Indonesia-Australia dan kerja sama perdagangan Indonesia-Australia.

BAB 3 akan membahas mengenai analisis negara Indonesia memilih Australia sebagai pemasok daging sapi yang pada awal pembahasan akan membahas komoditas sapi di Indonesia, Kompetisi Supplier Daging Sapi, dan Kerja sama Indonesia-Australia di bidang impor daging sapi.

BAB 4 akan menjelaskan hasil analisis penulis mengenai kebijakan Indonesia dalam bidang impor daging sapi tahun 2016-2019.